



TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Email: j.transformasi@ummat.ac.id

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>

ISSN: 2797-5940 (Online), ISSN: 2797-7838 (Print)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Jln. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB (83115)

Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula: Inisiatif Untuk Integritas Pemilu

Political Education for Novice Voters: Electoral Integrity Initiative

Iwan Tanjung Sutarna¹, Azwar Subandi², Ilham Zitri³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Mataram

iwan.tanjung@ummat.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pendidikan politik yang telah dilakukan kepada pemilih pemula. Pendidikan politik bertujuan untuk membangun kesadaran kritis generasi muda sebagai agen perubahan dalam menghasilkan pemilu berintegritas. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2023, siswa Sekolah Menengah Atas sebagai subyek utama. Menghadirkan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bersama tim Ilmu Pemerintahan sebagai pemateri. Mengenalkan pentingnya politik dan pemilu berintegritas. Pemberian materi dan tanya jawab dalam forum diskusi merupakan metode utama dalam aktivitas ini. Hasil pendidikan politik ini diharapkan menimbulkan kesadaran kritis terhadap hak politik dalam menghasilkan pemilihan umum berintegritas.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Pemilu.

Abstract

This article aims to describe the results of political education that has been carried out for novice voters. Political education aims to build a critical awareness of the younger generation as agents of change in producing election integrity. This activity was carried out in March 2023, with high school students as the main subject. Presenting election organizers such as the General Election Commission (KPU) and the General Election Supervisory Agency (Bawaslu), along with the Government Science team as presenters. Introducing the importance of politics and election integrity. Providing material through lectures and questions and answers is the main method in this activity. The results of this political education are expected to awareness of political rights in election integrity.

Keywords: Political Education, General Election.

Submitted : 09-04-2023, Revision : 15-04-2023, Accepted : 20-04-2023

PENDAHULUAN

Partisipasi politik adalah elemen penting dalam kewarganegaraan demokratis (Willeck & Mendelberg, 2022). Hak untuk berpartisipasi adalah "the right of rights". Hak dasar menentukan bagaimana keputusan yang mempengaruhi kehidupan dibuat (Halabi, 2009). Melalui partisipasi, masyarakat mempengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun dengan mempengaruhi pemilihan orang-orang yang membuat kebijakan. Partisipasi politik menjadi sarana bagi warga negara mengkomunikasikan pandangannya (Uhlener & Irvine, 2015). Pemberian suara pada pemilu adalah bentuk partisipasi politik yang paling strategis. Mengingat pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat memilih perwakilannya pada lembaga-lembaga negara yang akan membuat kebijakan publik. Pemilu secara fungsional juga sebagai ruang bagi publik untuk memastikan kontrol atas otoritas dan akuntabilitas politik (Wojtasik, 2013). Dengan kata lain, pemilu adalah mekanisme menuntut pertanggungjawaban politisi (Heywood, 2002). Perspektif bottom-up pemilu sebagaimana yang disampaikan Heywood menjadi selaras dengan perspektif deep democratization yang digagas Michael Jhonston dimana warga negara mampu membela diri dan kepentingannya melalui politik (Jhonston, 2014). Perspektif ini penting untuk memastikan pemilu sebagai sarana kedaulatan dalam menghasilkan politisi terbaik yang berjuang untuk kepentingan rakyat.

Institusi politik ekstraktif, korupsi yang terus menerus adalah cermin buruk tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut direspon secara kritis oleh publik. Rendahnya kepercayaan publik terhadap kelembagaan partai berdasarkan beberapa riset lembaga survei menjadi bukti sikap publik terhadap politik. Pada tahap yang lebih mengkhawatirkan, kelompok muda adalah subyek utama penyumbang rendahnya kepercayaan kepada institusi politik. Berdasarkan survei lembaga Indikator Politik Indonesia, pada tahun 2021 menemukan 64,7 persen anak muda menilai partai politik atau politisi tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi (Farisa, 2021). Tahun 2022 Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis survei bertajuk pemilihan muda dan pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pasca Pandemi menyatakan DPR sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan paling rendah yakni sebesar 56,5 persen (Dzulfaroh, 2022). Survei yang lebih spesifik dilakukan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia pada tahun 2023 menyatakan 54 persen remaja perempuan di Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin politik saat ini (Wiryo, 2023). Hasil berbagai survei tersebut menjadi kontradiktif jika dihadapkan pada data KPU yang menyatakan anak muda dengan rentang usia 17-39 tahun sebagai pemilih mayoritas pada pemilu 2024.

Rendahnya kepercayaan anak muda terhadap politik hendaknya dibaca sebagai bentuk apatisisme politik. Suatu sikap kurangnya keterlibatan psikologis dalam urusan publik, pada tingkat tertentu abstain dari aktivitas politik (Mason et al., 1991). Meminjam perspektif Azyumardi Azra bahwasanya faktor utama munculnya apatisisme politik adalah tidak terselesaikannya berbagai kasus yang menjadi perhatian publik.

Dalam konteks Indonesia apatisme politik jika tidak segera direspon bisa berakibat pada kian terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi (Azra, 2010). Oleh karena itu mendorong mekanisme bottom-up dalam pemilu menjadi pilihan paling strategis dalam memastikan pemilih muda terlibat dalam pemilu. Salah satu intervensi yang bisa didorong adalah melalui pendidikan politik untuk pemilih muda. Mengapa pendidikan politik dan pemilih muda sebagai subyek? Pendidikan politik adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, sistematis dan secara terus menerus hingga timbul kesadaran politik dan terlibat sebagai partisipan dalam mencapai tujuan politik (Handoyo & Lestari, 2017; Sunarso, 2007). Meminjam perspektif Giesecke, pendidikan politik dapat dipahami dalam arti *aktionwissen* yakni: 1). Mampu bertindak laku cepat, cermat dan benar yang didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan. 2). Refleksi objektif, dan 3). Wawasan kritis (Dalam Handoyo & Lestari, 2017). Setidaknya terdapat empat tujuan pendidikan politik sebagaimana yang dikemukakan Khoiron: 1). Mempromosikan perluasan kepentingan dan partisipasi dalam semua tingkatan pemerintahan. 2). Memperdalam dasar-dasar sejarah, filsafat, sosial ekonomi dan politik. 3). Menyemaikan komitmen dan keberpihakan yang rasional atas prinsip dan nilai fundamental berdasarkan konstitusi. 4). Mempromosikan peran kelembagaan berikutan nilai-nilai masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Dalam Handoyo & Lestari, 2017).

Pendidikan politik memberi perubahan terhadap meningkatnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban politik warga. Memberi pengaruh terhadap kondisi sosial, dan meningkatkan minat untuk terlibat dalam partisipasi politik (Husna & Fahrimal, 2021). Singkatnya pendidikan politik bertujuan untuk membentuk kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya berdasarkan konstitusi (Sunarso, 2007). Mengapa pemilih muda sebagai subyek? Setidaknya terdapat tiga argumentasi yang melatari. 1.) Pemuda adalah subyek penting dalam partisipasi politik menjelang pemilu 2024. Pemilih muda adalah pemilih mayoritas, mencapai 60 persen dari total pemilih. 2.) Pemuda khususnya pemilih pemula memiliki sedikit literasi mengenai politik dan urgensi pemilu dalam negara demokrasi (Hajad & Ikhsan, 2019). 3.) Kaum muda melalui platform media sosial secara aktif melakukan gerakan protes terhadap korupsi dan ketidakadilan. Platform media sosial menjadi medium baru dalam menyuarakan suara individu-individu untuk berpartisipasi dalam demokrasi (Saad & Margono, 2021). Kaum muda tidak hanya lebih peka terhadap tren elektoral tetapi juga memberi pengaruh kepada tren elektoral kepada yang lebih tua (Rekker, 2022). Temuan akademis tersebut memberi sinyalemen bahwasanya pemuda masih menjadi subyek utama dalam menciptakan perubahan sosial. Sejalan dengan itu, dalam konteks gerakan politik Indonesia, pemuda adalah pelopor perubahan (Setyowati, 2021).

Berdasarkan berbagai persilangan konseptual dan praksis sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, mendorong pendidikan politik sebagai suatu inisiasi menempatkan pemilu sebagai mekanisme koreksi perlu dilakukan. Pendidikan politik menjadi pendekatan paling strategis yang berpengaruh determinan pada aspek kognitif pemilih. Meminjam perspektif Halking, bahwasanya aspek kognitif bertujuan membangun

pengetahuan politik warga negara (civic knowledge) terhadap konsep-konsep politik dasar sehingga menimbulkan kesadaran politik yang kritis (Dalam Yoesmar & Apriyani, 2019). Atas dasar argumentasi dan temuan tersebut, Tim pengabdian masyarakat Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram, melalui pembiayaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Mataram menjalankan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendidikan politik untuk pemilih pemula. Menempatkan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Tanjung sebagai subyek utama. Pendidikan politik ini dilaksanakan untuk memenuhi tiga tujuan berikut. 1). Mengenalkan konsep dasar politik dan pentingnya politik dalam kehidupan kolektif. 2). Mengenalkan fungsi-fungsi kelembagaan demokratis dalam pemilu. 3). Menimbulkan kesadaran kritis untuk terlibat dalam menghasilkan pemilu berintegritas.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini diarahkan pada penguatan aspek kognitif melalui ceramah bertema politik dan kepemiluan. Didesain dengan pendekatan partisipatif melalui tanya jawab. Untuk itu pemateri pada kegiatan pengabdian ini tidak hanya berasal dari akademisi Ilmu Pemerintahan UMMAT tetapi juga berasal dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Maret 2023 bertempat di SMA Negeri 1 Tanjung Lombok Utara. Peserta kegiatan ini adalah pengurus OSIS yang merupakan representasi dari perwakilan siswa. Termasuk dalam kategori pemilih pemula yang memiliki sedikit pengetahuan politik, pemilu dan mekanismenya. Pelaksanaan pendidikan politik dijalankan secara interaktif dengan terlebih dahulu berupaya mendapatkan gambaran mengenai pemahaman peserta terkait politik dan kepemiluan. Pendidikan politik ini bertujuan mengenalkan politik, pemilu dan relevansinya dalam kehidupan kolektif. Menumbuhkan kesadaran kritis untuk terlibat dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas. Membekali peserta dengan ragam perspektif politik dan kepemiluan. Materi yang diberikan terkait konsep politik dan pentingnya politik dalam mengatur kehidupan kolektif. Termasuk peran KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.

Pentingnya Politik Dalam Kehidupan Kolektif

Pertanyaan mendasar yang paling sering didengar adalah apa itu politik dan mengapa kita membutuhkannya? Pertanyaan semacam ini merefleksikan betapa kehidupan kolektif sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari politik. Kekuasaan politik yang didapatkan melalui mekanisme pemilu memberi legitimasi bagi pemenang elektoral membuat kebijakan publik. Memberi dampak terhadap siklus kehidupan manusia. Dari lahir hingga mati tidak terlepas dari pengaruh politik. Untuk tema ini, pemateri berasal dari akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan Ummat. Pemateri membekali peserta dengan pengetahuan yang relevan terkait pentingnya politik dalam

kehidupan kolektif. Salah satunya Meminjam perspektif Hannah Arendt mengenai politik sebagai aktivitas manusia yang paling penting karena melibatkan interaksi di antara warga negara yang bebas dan setara (Dalam Heywood, 2013). Tahapan selanjutnya menjelaskan terkait konsep umum mengenai politik sebagai kekuasaan dengan meminjam perspektif Harold Laswell dan perspektif Heywood terkait pendekatan politik dalam membuat, mempertahankan, dan mengubah aturan umum (Heywood, 2013). Pemateri kemudian menjelaskan secara ringkas peran politik dalam mencapai keputusan yang berdampak pada kepentingan bersama dan kepentingan yang saling bersaing dari para anggota kelompok. Pemateri kemudian menutup paparan dengan menjelaskan mengapa politik penting dalam kehidupan bernegara dengan meminjam perspektif Heywood bahwasanya politik dibutuhkan untuk mencapai konsensus dan distribusi sumber daya (Heywood, 2013). Penjelasan atas berbagai konsep tersebut dilakukan dengan sebanyak mungkin memberi contoh yang relevan mengenai dampak politik terhadap kehidupan peserta sebagai pelajar maupun sebagai warga negara. Sebagian besar peserta tidak memiliki literasi politik dan pemilu yang memadai. Berbagai konsep yang dijelaskan adalah hal baru bagi para peserta. Hal ini cukup beralasan mengingat para peserta adalah para pelajar yang belum berada pada level pengetahuan yang lebih spesifik belajar mengenai politik dan pemerintahan sebagaimana pada jenjang perguruan tinggi.

Oleh karena itu, berbagai pandangan akademik tersebut disampaikan sebagai upaya mengenalkan, memperkuat aspek kognitif peserta mengenai politik dan keterikatan mereka dengan kehidupan politik. Mengingat tidak semua pemilih muda atau pemilih pemula memiliki akses dalam mendapatkan pengetahuan teoretis-konseptual yang memadai. Kesenjangan pengetahuan terhadap berbagai konsep tersebut mereduksi peluang pemilih muda atau yang dalam kegiatan pendidikan politik ini disebut sebagai pemilih pemula dalam memberi makna terhadap keterikatan mereka dengan politik. Penjelasan mengenai mengapa kita membutuhkan politik menambah khazanah pemikiran peserta untuk setidaknya terlibat dalam pemilu sebagai salah satu bentuk partisipasi politik. Penjelasan konseptual menjadi penting dalam meningkatkan kemampuan kognitif peserta. Sedikit tercerahkan adalah idiom yang merepresentasikan adanya perubahan. Tidak secara instan mampu merubah seluruh pemikiran dan sikap politik, mengingat pendidikan politik adalah suatu usaha yang harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Peran KPU dan Bawaslu dalam Pemilu

Pada fase ini, para peserta diberikan pemahaman yang memadai terkait peran KPU dan Bawaslu dalam pemilu. Penjelasan mengenai aspek peran dan kelembagaan pemilu dipresentasikan oleh Ketua KPU dan Komisioner Bawaslu Lombok Utara. Pemateri menjelaskan tugas dan fungsi kelembagaan penyelenggara pemilu dengan mengacu pada Undang-Undang NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dijelaskan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Sementara Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh apa yang menjadi Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu diatur dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017

Setelah para pemateri menjelaskan konsep politik dan kepemiluan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu secara interaktif oleh saudara Eka Surya Ningrat, yang juga merupakan ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Pada sesi ini tergambar umpan balik yang menarik dari peserta, tergambar melalui pertanyaan kritis yang ditujukan kepada para pemateri. Setidaknya terangkum sebagai berikut: 1). Mengapa harus terlibat dalam pemilu. 2). Bagaimana menentukan pemimpin yang baik. 3). Apa yang dimaksud dengan dapil. Jika ditelaah berbagai pertanyaan tersebut mengindikasikan beberapa hal sebagai berikut: 1). Pemilih pemula masih belum memiliki pengetahuan politik yang memadai. Dibutuhkan intervensi melalui pendidikan politik yang secara kontinu terus dilakukan. Terutama terkait konsep politik dan peran kelembagaan pemilu. 2). Pemilih pemula belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait mekanisme pemilu. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi politik dari penyelenggara pemilu, menysar pemilih muda atau pemilih pemula sebagai subyek sosialisasi. 3). Pendidikan politik mempengaruhi aspek kognitif pemilih pemula untuk sadar hak dan kewajiban politiknya. Tergambar dari pertanyaan seperti untuk apa terlibat dalam pemilu, kriteria pemimpin politik seperti apa yang harus dipilih, hingga bermuara pada kesadaran pentingnya partisipasi politik dalam pemilu. Pada sesi tanya jawab ini salah satu peserta mempertanyakan hak politiknya yang belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024. Peserta meminta konfirmasi langsung kepada Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara yang hadir sebagai pemateri. Menanyakan langkah-langkah strategis apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal serupa. Pada akhir acara peserta berkomitmen mewujudkan pemilu yang berintegritas dan secara simbolik berkomitmen untuk menolak politik uang.



Gambar 1. Sesi Tanya Jawab



Gambar 2. Komitmen Pemilu Berintegritas Tolak Politik Uang

KESIMPULAN

Kolaborasi lembaga pendidikan dan penyelenggara pemilu dalam program pendidikan politik berkontribusi memberi pengayaan terhadap aspek kognitif pemilih pemula dalam memahami politik dan pemilu. Setidaknya para peserta mulai memahami fungsi politik dalam kehidupan kolektif sebagai warga negara. Mulai muncul kesadaran pentingnya partisipasi politik dalam mempengaruhi kebijakan dan pentingnya pemilu dalam menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Meskipun demikian, aktivitas pendidikan politik ini disadari tidak akan menciptakan perubahan signifikan jika tidak dilakukan secara berkesinambungan. Tidak akan berdampak determinan jika hanya dilakukan oleh entitas kelembagaan tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan sinergisitas berbagai kelembagaan demokratis dan secara kontinu dilakukan dalam memastikan pemilih muda atau pemilih pemula hadir sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pemilu berintegritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah hadir memastikan terselenggaranya program pengabdian ini, diantaranya: 1). Ketua dan unsur pimpinan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Mataram. 2). Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan. 3). Kepala Sekolah, Waka Humas Ibu Putu Desy Wulandari dan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Tanjung Kabupaten Lombok Utara. 4). Juraidin SH., MH Ketua KPU Lombok Utara. 5). Deni Hartawan, SH Komisioner Bawaslu Lombok Utara. 6). Eka Surya Ningrat, S.Kel Ketua Panwas Kecamatan Tanjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2010). Apatisme Politik. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2010/08/03/08525794/~Nasional>
- Dzulfaroh, A. N. (2022). DPR RI Lembaga Paling Tidak Dipercaya Anak Muda Versi Survei CSIS. <https://www.kompas.com>.
- Farisa, F. C. (2021). Survei Indikator: 64,7 Persen Anak Muda Nilai Politisi Tak Mewakili Aspirasi Rakyat. <https://nasional.kompas.com>.
- Hajad, V., & Ikhsan, I. (2019). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di SMAN 1 Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v1i1.1237>
- Halabi, S. (2009). Participation and the right to health: lessons from Indonesia. *Health Hum Rights.*, 11(1), 247–274.
- Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). Pendidikan Politik. *Pohon Cahaya*.
- Heywood, A. (2002). *Key Concepts in Politics*. PALGRAVE MACMILLAN.
- Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). PALGRAVE MACMILLAN.
- Husna, A., & Fahrimal, Y. (2021). Pendidikan Politik : Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 3(1).
- Jhonston, M. (2014). *Corruption, Contention, and Reform: The Power of Democratization*. Cambridge University Press.
- Mason, D. S., Nelson, D. N., & Szklarski, B. M. (1991). Apathy and the Birth of Democracy: The Polish Struggle. *East European Politics & Societies*, 5(2), 205–233. <https://doi.org/10.1177/0888325491005002001>
- Rekker, R. (2022). Young trendsetters: How young voters fuel electoral volatility. *Electoral Studies*, 75(February), 102425. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2021.102425>
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology and Politics*, 18(4), 443–454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Setyowati, A. (2021). Menilik Peran Pemuda dalam Arah Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia. *Kompas.com*
- Sunarso. (2007). Pendidikan Politik. *Civics*, 4(2).
- Uhlaner, C. J., & Irvine, C. (2015). Politics and Participation. In *International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences* (Second Edi, Vol. 16). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.93086-1>
- Willeck, C., & Mendelberg, T. (2022). Education and Political Participation. *Annual Review of Political Science*, 25, 89–110. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-014235>
- Wiryo, S. (2023). Survei: 54 Persen Remaja Perempuan Indonesia Tak Percaya Pemimpin Politik. <https://nasional.kompas.com>.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/23465661/survei-54-persen-remaja-perempuan-indonesia-tak-percaya-pemimpin-politik>

- Wojtasik, W. (2013). Title : Functions of elections in democratic systems Author : Waldemar Wojtasik Citation style : Wojtasik Waldemar . (2013). Functions of elections in democratic systems . , Political Preferences ” (2013 , nr 4 , s . 25-38), DOI : Political Preferences, 4. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.729054>
- Yoesmar, F., & Apriyani, L. (2019). Pendidikan Politik Menuju Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Majelis*, 8.